

Mendedah Pemihakan APBB Kabupaten Badung Tahun 2023 Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Oleh: Neny Triana

Mahasiswa MAP Universitas Terbuka

Pendahuluan

Tujuan didirikannya Negara Indonesia dapat dilihat secara terang-benderang dalam alinea empat Pembukaan UUD 1945. Bagi Kabupaten Badung, tujuan pembangunan adalah percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat (welfare state) dengan cara mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hal ini juga tercermin pada visi Kabupaten Badung yaitu melanjutkan kebahagiaan masyarakat badung melalui pembangunan yang berlandaskan tri hita karena.

Berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), visi Kabupaten Badung dijabarkan kembali ke dalam misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan pada penguatan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat, pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM berdasarkan potensi wilayah dan masyarakat, meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui sistem jaminan sosial yang komprehensif, memperkuat sinergi pariwisata dengan pertanian yang berorientasi pada agroindustry dan pelestarian sumber daya alam, serta meningkatkan daya saing daerah yang berbasis kreativitas dan inovasi.

Mengambil tema perkuatan ketahanan masyarakat melalui transformasi ekonomi serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan jaring pengaman sosial, Kabupaten Badung memiliki lima bidang prioritas pola pembangunan nasional semesta berencana yang seiring sejalan dengan nasional dan provinsi yang meliputi:

1. Pangan, sandang, papan.
2. Kesehatan dan pendidikan.
3. Jaminan sosial dan ketenagakerjaan.
4. Adat, agama, tradisi, seni, dan budaya.
5. Pariwisata.

Untuk mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, Kabupaten Badung juga membuat prioritas pembangunan pada bidang-bidang:

1. Infrastruktur.
2. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Penataan ruang, kawasan pemukiman, dan pengendalian penduduk.
4. Lingkungan hidup dan kebencanaan.

Secara kuantitatif, target pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2023 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,00% - 4,50%.
2. Persentase kemiskinan sebesar 1,95%.

3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,00% - 2,00%.
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,61%.
5. Gini Ratio sebesar 0,300.

Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kecenderungan derajat IPM di Kabupaten Badung?
2. Seberapa besar prosentase belanja APBD Kabupaten Badung Tahun 2023 yang mendukung peningkatan IPM dan menurunkan kemiskinan?
3. Seberapa mandiri APBD Kabupaten Badung Tahun 2023?
4. Berapa solvabilitas anggaran APBD Kabupaten Badung Tahun 2023?
5. Berapa fleksibilitas keuangan APBD Kabupaten Badung Tahun 2023?

Tujuan Penulisan Makalah

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, tujuan penulisan makalah adalah

1. Mengetahui kecenderungan derajat IPM Kabupaten Badung
2. Mengetahui prosentase belanja APBD Kabupaten Badung Tahun 2023 yang mendukung peningkatan IPM dan kemiskinan.
3. Mengetahui kemandirian keuangan APBD Kabupaten Badung Tahun 2023.
4. Mengetahui solvabilitas anggaran APBD Kabupaten Badung Tahun 2023.
5. Berapa fleksibilitas keuangan APBD Kabupaten Badung Tahun 2023.

Deskripsi APBD Kabupaten Badung Tahun 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah (perda). Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja, surplus/deficit, dan pembiayaan. Tata cara penyusunan dan penetapan APBD mengikuti PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022.

Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran. Pendapatan meliputi pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Nilai PAD sebesar 5,187 triliun. Sedangkan nilai pendapatan transfer sebesar 872,835 miliar.

PAD bersumber dari pajak dan retribusi daerah, kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kebijakan lain-lain PAD yang sah. Nilai pajak daerah sebesar 4,630 triliun dan retribusi daerah sebesar 112,796 miliar. Nilai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 183,379 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sebesar 261,411 miliar.

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Peruntukan pendapatan transfer telah diatur secara khusus, sehingga penggunaannya lebih kaku dibandingkan pendapatan asli daerah. Pendapatan

transfer dari pemerintah pusat antara lain dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana otonomi khusus, kebijakan insentif khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Nilai pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 706,843 miliar.

Pendapatan transfer antar pemerintah daerah adalah pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil berasal dari pemerintah daerah provinsi. Sedangkan pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang berasal dari daerah otonom lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan kemampuan keuangan, atau dana untuk tujuan tertentu. Nilai pendapatan transfer antar pemerintah daerah adalah 165,992 miliar.

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Total belanja daerah sama dengan pendapatan daerah sebesar 6,06 triliun.

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Nilai belanja pegawai sebesar 1,881 triliun. Nilai belanja barang dan jasa sebesar 1,541 triliun. Nilai belanja subsidi sebesar 4,492 miliar. Nilai belanja hibah sebesar 461,122 miliar, sedangkan nilai belanja bantuan sosial sebesar 359,5 juta. Sehingga total belanja operasi sebesar 3,891 triliun.

Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal asset tetap lainnya dan belanja modal asset lainnya. Nilai belanja modal tanah sebesar 114,06 miliar; belanja modal peralatan dan mesin sebesar 195,617 miliar; belanja modal gedung dan bangunan sebesar 380,477 miliar; belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 193,295 miliar; belanja modal asset tetap lainnya sebesar 10,714 miliar; dan belanja modal asset lainnya sebesar 9,618 miliar. Sehingga total belanja modal adalah 903, 781 miliar.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa. Nilai belanja tidak terduga sebesar 72,086 miliar.

Belanja transfer merupakan pengeluaran antar pemerintah daerah dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer ada dua yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil dari pajak dan retribusi yang boleh dipungut oleh pemerintah provinsi. Sedangkan belanja bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten/kota, dari provinsi ke kabupaten/kota dan sebaliknya, serta dari provinsi/kabupaten/kota ke desa. Nilai belanja bagi hasil sebesar 525,453 miliar dan belanja bantuan keuangan sebesar 667,813 miliar. Sehingga total belanja transfer sebesar 1,193 triliun.

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Karena total belanja daerah sama dengan pendapatan daerah sebesar 6,06 triliun. Sehingga APBD Kabupaten Badung mengalami surplus atau defisit sebesar nol rupiah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nilai pembiayaan pada APBD Kabupaten Badung sebesar nol rupiah.

Berikut adalah tabel APBD Kabupaten Badung Tahun 2023

I. Pendapatan	
PAD	5.187.633.164.473,00
Pendapatan Transfer	872.834.946.851,00
Jumlah pendapatan	6.060.468.111.324,00
II. Belanja	
a. Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	1.880.616.783.166,00
Belanja Barang dan Jasa	1.544.742.710.234,00
Belanja Subsidi	4.492.500.000,00
Belanja Hibah	461.122.324.664,00
Belanja Bantuan Sosial	359.500.000,00
Jumlah Belanja Operasi	3.891.333.818.064,00
b. Belanja Modal	
Belanja Modal Tanah	114.060.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.617.266.810,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.477.359.629,00
Belanja Modal Jaringan, Jalan, dan Irigasi	193.294.710.882,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.713.820.761,00
Belanja Modal Aset Lainnya	9.618.150.000,00
Jumlah Belanja Modal	
c. Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00
d. Belanja Transfer	
Belanja Bagi Hasil	524.453.108.573,00
Belanja Bantuan Keuangan	667.813.843.359,00

Jumlah Belanja Transfer	1.193.266.951.932,00
Jumlah Belanja	6.060.468.111.324,00
Surplus/Defisit	00,00
III. Pembiayaan	
Penerimaan pembiayaan	00,00
Pengeluaran Pembiayaan	00,00
Jumlah Pembiayaan Netto	00,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	00,00

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam pembangunan kualitas hidup manusia. UNDP menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. IPM juga digunakan untuk mengukur pertumbuhan dan pembangunan suatu Negara. IPM merupakan instrument analitis kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat. IPM telah memperluas cakrawala bahwa pembangunan bukan hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dianut oleh teori pertumbuhan, akan tetapi juga didalamnya terdapat variabel sosial, sebagaimana yang dianut dalam teori modernisasi.

Indonesia telah menggunakan IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan sejak tahun 1996. Parameter yang digunakan untuk mengukur IPM ada tiga yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan/pendidikan, dan standar hidup layak. Proksi umur panjang dan hidup sehat adalah umur harapan hidup (UHH) bayi yang baru lahir. Proksi pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas yang mengecap pendidikan formal dan harapan lama sekolah. Proksi standar hidup layak atau kemampuan daya beli adalah pengeluaran per kapita. Dengan demikian melalui IPM, akan dapat diketahui sejauh mana tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan layak tidaknya kehidupan masyarakat sebagai dampak dari pembangunan.

BPS membuat empat kelompok IPM yang terdiri dari:

1. Nilai $IPM \geq 80$ merupakan Kelompok sangat tinggi
2. Nilai $70 \leq IPM < 80$ merupakan kelompok tinggi
3. Nilai $60 \leq IPM < 70$ merupakan kelompok sedang
4. Nilai $IPM < 60$ merupakan kelompok rendah

Mengutip laman resmi Kementerian Kominfo, Kepala Bappenas menyatakan bahwa pada tahun 2023, pemerintah pusat menargetkan indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35. Sedangkan merujuk RKPD tahun 2023, Kabupaten Badung menargetkan IPM sebesar 81,61. Target pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2023 yang ingin dicapai adalah sebai berikut:

Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD TAHUN 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,00 - 4,50
2	Persentase Kemiskinan	1,95
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,00 - 2,00
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,61
5	Gini Ratio	0,300

Sumber: RKPD Kabupaten Badung 2023

Hasil penelitian Sidabutar, dkk (2020) memperlihatkan bahwa APBD untuk pendidikan dan kemiskinan memiliki relasi positif dan signifikan terhadap derajat IPM. Sidabutar, dkk (2020) juga menyarankan agar pemerintah daerah mengalokasikan 20% APBD untuk belanja di bidang pendidikan dan 10% APBD untuk belanja di bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan amanat untuk mengalokasikan minimal 20% dari APBN/APBD untuk dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

Senada dengan Sidabutar, dkk (2020), hasil penelitian Palayukan (2019) juga menyatakan bahwa peningkatan alokasi belanja pendidikan dan kesehatan, serta ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita diperlukan untuk meningkatkan IPM. Derajat IPM yang tinggi, pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kecenderungan Derajat IPM Kabupaten Badung

Sejak tahun 2017, Badung telah memiliki nilai IPM lebih dari 80 dan menjadikannya pada kelompok sangat tinggi. Usia harapan hidup lebih dari 75 tahun, harapan lama sekolah lebih dari 13,94 tahun, rata-rata lama sekolah 9,99 tahun, dan pengeluaran per kapita lebih dari Rp 17.000.000. Merujuk data dan informasi yang didapatkan dari BPS Kabupaten Badung, berikut adalah tabel IPM Kabupaten Badung untuk sepuluh tahun terakhir:

Komponen IPM	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Usia Harapan Hidup (tahun)	74,19	74,3	74,31	74,42	75,53	74,71	74,99	75,1	75,18	75,51
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,88	13	13,45	13,66	13,94	13,95	13,97	13,98	13,99	14,03

Komponen IPM	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,18	9,29	9,44	9,9	9,99	10,06	10,38	10,39	10,62	10,64
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	16025	16080	16409	16567	17063	17325	17628	17 503	17 327	17 445
Indeks Pembangunan Manusia	77,63	77,98	78,86	79,8	80,54	80,87	81,59	81,6	81,83	82,13

Sumber: Data BPS diolah



Gambar 1. IPM Kabupaten Badung 2013-2022

Berdasarkan tabel dan gambar di atas terlihat bahwa kecenderungan derajat IPM tahun 2013-2022 selalu meningkat. Dari kategori tinggi dengan nilai IPM 77,63 menjadi sangat tinggi dengan nilai IPM 82,13. Usia harapan hidup yang semula 74,19 tahun bergerak naik menjadi 75,51 tahun. Harapan lama sekolah yang semula 12,88 tahun menjadi 14,03 tahun. Rata-rata lama sekolah yang semula 9,18 tahun menjadi 10,64 tahun. Pengeluaran per kapita yang semula Rp 16.025.000,00 menjadi Rp 17.445.000,00.

Dengan nilai IPM 82,13 pada tahun 2023, Kabupaten Badung jauh lebih baik dibanding nasional yang memiliki IPM 72,91. Kabupaten Badung juga lebih baik dibandingkan IPM Provinsi Bali yang memiliki nilai 76,44. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Kota Denpasar, IPM Kabupaten Badung lebih rendah dibandingkan Kota Denpasar yang memiliki nilai 84,37.

Kemiskinan pada Kabupaten Badung

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung 2017 – 2021 fluktuatif. Tahun 2019 tingkat kemiskinan sempat turun menjadi 1,98%, namun kembali naik sebesar 2,02% pada tahun 2020 dan sebesar 2,62% pada 2021. Hal ini sangat dipengaruhi oleh lumpuhnya sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Badung. Target persentase kemiskinan tahun 2023 sebesar 1,95%.

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d. 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	500 885,00	534 069,00	547 186,00	587 737,00	613 993,00
Jumlah Penduduk Miskin	12,91	13,16	12,97	13,75	18,52
Persentase Penduduk Miskin (%)	2,06	2,06	1,98	2,02	2,62
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,19	0,21	0,28	0,31	0,43
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,05	0,05	0,07	0,07	0,10

Sumber: RKPD Kabupaten Badung 2023

Untuk menurunkan kemiskinan, Badung telah menjalankan kebijakan serta strategi yang meliputi:

1. Mengurangi beban sosial ekonomi masyarakat miskin dengan cara memenuhi kebutuhan dan pemberian akses terhadap pangan, kesehatan, serta pendidikan.
2. Memberdayakan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin melalui sektor lain yang mampu memberikan daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar.
3. Memperkuat sinergi dan kemitraan multipihak melalui program penanggulangan kemiskinan dengan cara melibatkan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (CSR).

Prosentase Belanja APBD Kabupaten Badung yang Mendukung IPM

Untuk menghitung prosentase belanja APBD Kabupaten Badung yang mendukung IPM, pertama kali harus diidentifikasi belanja mana saja yang mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Setelah identifikasi selesai, nilai belanja kemudian ditotal. Hasilnya kemudian dibagi dengan total belanja dalam satu tahun anggaran dikalikan seratus persen.

$$Y \% = (X : Z) \times 100\%$$

Y = prosentase belanja APBD Kabupaten Badung yang Mendukung IPM

X = total belanja APBD Kabupaten Badung yang Mendukung IPM

Z = total belanja Kabupaten Badung dalam satu tahun anggaran

No.	Jenis Belanja	Nilai (Rp)	Prosentase terhadap belanja APBD (%)
1.	Belanja operasi yang mendukung IPM	994.301.190.378,00	16,41
2.	Belanja modal yang mendukung IPM	995.717.446.640,00	16,43
3.	Belanja tidak terduga yang mendukung IPM	72.086.033.246,00	1,19
4.	Belanja transfer yang mendukung IPM	1.054.943.692.669,00	17,41
5.	Total Belanja yang mendukung IPM	3.117.048.362.933,00	51,43
6.	APBD Kabupaten Badung 2023	6.060.468.111.324,00	100,00
7.	Prosentase belanja yang mendukung IPM	51,43%	-

Dari hasil identifikasi, total belanja APBD Kabupaten Badung yang mendukung IPM sebesar 3,117 triliun. Belanja operasi yang mendukung IPM sebesar 994,301 miliar. Belanja modal yang mendukung IPM sebesar 995,717 miliar. Belanja tidak terduga yang mendukung IPM sebesar 72,086 miliar. Belanja transfer yang mendukung IPM sebesar 1,055 triliun. Total belanja APBD Kabupaten Badung sebesar 6,060 triliun. Sehingga prosentase belanja APBD Kabupaten Badung yang mendukung IPM sebesar 51,43%.

Belanja APBD yang mendukung IPM adalah belanja untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, dan belanja yang mendukung untuk pencapaian standar hidup layak. Belanja operasi yang mendukung IPM antara lain: belanja iuran jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN, DPRD, KDH/WKDH, belanja suku cadang alat kedokteran, belanja obat-obatan, belanja jasa tenaga pendidikan dan kesehatan, belanja SDA, belanja barang dan jasa BOS, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial dan sebagainya.

Belanja modal yang mendukung IPM antara lain: belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, belanja modal alat laboratorium, belanja alat keselamatan kerja, belanja peralatan dan mesin BOS, belanja bangunan kesehatan, gedung tempat pendidikan, gedung tempat olahraga, fasilitas umum, serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk keadaan darurat karena ada bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Misalnya ketika pandemic COVID-19 terjadi, dana darurat ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk penanganan pandemic.

Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil pajak kepada pemerintahan desa dan belanja bantuan keuangan kepada desa. Keduanya biasa dikenal dengan sebutan dana desa. Penggunaan dana desa mendukung peningkatan derajat IPM. Ini dapat dilihat dari tujuan dan skala prioritas penggunaan dana desa.

Tujuan alokasi dana desa antara lain: pengurangan kemiskinan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan untuk masyarakat, peningkatan kualitas perencanaan dan pendanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan swadaya serta gotong royong masyarakat dan juga peningkatan pendapatan desa dan masyarakat melalui Bumdes.

Skala prioritas pemakaian dana desa adalah untuk:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan serta pendidikan anak usia dini.
2. Pembangunan sarana serta prasarana (infrastruktur) desa seperti jalan, embung, energi baru, sanitasi, air bersih dan irigasi tersier.
3. Peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui kegiatan wirausaha, peningkatan pendapatan dan skala ekonomi masyarakat desa untuk membangkitkan potensi ekonomi lokal.

Kemandirian Keuangan APBD Kabupaten Badung

Kemandirian keuangan merupakan indikator kemampuan daerah untuk menyelenggarakan hak keuangan secara efektif dan efisien. Rasio kemandirian keuangan merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan pada APBD. Rasio kemandirian keuangan memiliki nilai antara 0 – 1. Kemandirian keuangan semakin tinggi, apabila nilai rasionya mendekati 1. Untuk menghitung kemandirian keuangan APBD Kabupaten Badung digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \text{Total PAD} : \text{Total Pendapatan}$$

Rasio kemandirian keuangan Kabupaten Badung tahun 2023 sebesar 0,86. Kemandirian keuangan Kabupaten Badung sangat tinggi. Sehingga kemampuan Badung untuk menyelenggarakan hak keuangan secara efektif dan efisien sangat tinggi, termasuk belanja-belanja yang telah direncanakan untuk mendorong kenaikan derajat IPM dan mengurangi kemiskinan.

Solvabilitas Anggaran Kabupaten Badung

Solvabilitas anggaran adalah kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban anggaran (Ritonga, 2014). Solvabilitas anggaran merupakan perbandingan antara hasil total pendapatan dikurangi pendapatan DAK dengan belanja pegawai. Semakin tinggi nilai rasio solvabilitas, semakin sehat anggaran APBD. Untuk menghitung rasio solvabilitas anggaran Kabupaten Badung digunakan rumus sebagai berikut (Ritongan, 2014):

$$\text{Solvabilitas Anggaran} = (\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan DAK}) : \text{Belanja Pegawai}$$

DAK fisik Kabupaten Badung tahun 2023 sebesar 9,116 miliar, sedangkan DAK non fisik 209,969 miliar. Rasio solvabilitas anggaran Kabupaten Badung tahun 2023 sebesar 3,11. Artinya Kabupaten Badung, bisa memenuhi kewajiban belanja pegawai sebesar 3,11

kali. Ini menandakan APBD Kabupaten Badung sangat sehat. Kesehatan keuangan APBD Kabupaten Badung akan berguna untuk menopang belanja-belanja yang mendukung peningkatan derajat IPM dan menurunkan kemiskinan.

Fleksibilitas Keuangan Kabupaten Badung

Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan daerah guna mengantisipasi kejadian tidak terduga di masa yang akan datang (Ritonga, 2014). Fleksibilitas keuangan merupakan perbandingan antara hasil total pendapatan dikurangi pendapatan DAK dengan jumlah kewajiban. Semakin tinggi nilai rasio fleksibilitas keuangan Kabupaten Badung digunakan rumus sebagai berikut (Ritonga, 2014):

$$\text{Fleksibilitas Keuangan} = (\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan DAK}) : \text{Jumlah Kewajiban}$$

DAK fisik Kabupaten Badung tahun 2023 sebesar 9,116 miliar, sedangkan DAK non fisik 209,969 miliar. Di dalam APBD juga diketahui bahwa Badung tidak memiliki kewajiban/hutang. Sehingga rasio fleksibilitas keuangan Kabupaten Badung tahun 2023 menjadi tak terhingga atau sangat fleksibel. Artinya Kabupaten Badung memiliki kemampuan sangat fleksibel untuk mengantifikasi kejadian tidak terduga di masa mendatang. Ini menandakan APBD Kabupaten Badung sangat fleksibel. Fleksibilitas keuangan Kabupaten Badung akan berguna untuk menopang belanja-belanja yang mendukung peningkatan derajat IPM dan menurunkan kemiskinan.

Analisis Pemihakan APBD Kabupaten Badung Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Penurunan Kemiskinan

Dalam sepuluh tahun terakhir, IPM Kabupaten Badung cenderung meningkat. Pada tahun 2022, nilai IPM Badung sudah mencapai 82,13. Usia harapan hidup menjadi 75,51 tahun. Harapan lama sekolah menjadi 14,03 tahun. Rata-rata lama menjadi 10,64 tahun. Pengeluaran per kapita menjadi Rp 17.445.000,00. Target IPM Badung 2023 hanya sebesar 81,61. Mengingat IPM Kabupaten Badung tahun 2022 sebesar 82,13, semestinya target IPM 81,61 ini akan dapat tercapai.

Tahun 2023, Kabupaten Badung juga merencanakan pengeluaran sebesar 51,43% APBD untuk belanja yang mendukung kenaikan IPM dan menurunkan kemiskinan, baik melalui belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga serta belanja transfer. Besarnya prosentase belanja yang mendukung peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan, menandakan besarnya keberpihakan Kabupaten Badung terhadap pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup masyarakatnya.

Dari sisi kemandirian keuangan, solvabilitas anggaran, dan fleksibilitas keuangan, APBD Kabupaten Badung sangat mandiri, sangat sehat, dan sangat fleksibel. Hal ini akan mendukung Kabupaten Badung untuk bisa mencapai target IPM tahun 2023 dan mampu mengurangi kemiskinan.

Keberpihakan, kemandirian, kesehatan dan fleksibilitas keuangan APBD Kabupaten Badung terhadap pembangunan manusia, harusnya dibarengi dengan ketepatan sasaran kegiatan. Dalam RKPD Kabupaten Badung diketahui bahwa jumlah penduduk yang tidak tamat SD pada tahun 2021 sebanyak 54.234 atau 10,54% dari jumlah penduduk. Prosentase penduduk yang mengenyam perguruan tinggi sebesar 13,29%. Rincian data sebagai berikut:

Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Kabupaten	Tingkat Pendidikan (%)					Perguruan Tinggi	Jumlah
		Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tdk tamat SD	SD/MI	SMP	SMA		
1	Badung	89.600	54.234	75.619	54.427	172.125	68.385	514.390

Sumber: RKPD Kabupaten Badung 2023

Angka partisipasi murni (APM) sebesar 114,46% untuk SD/MI dan sebesar 99,57% untuk SMP/MTS. Akan tetapi jika dicermati, APM SD/MI pada Kecamatan Abiansemal hanya 95,18% dan APM SD/MI Kecamatan Petang hanya 78,27%. Rincian data sebagai berikut:

Angka Partisipasi Murni menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APM (%)	Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM (%)
1	Kuta Selatan	12.775	11.303	113,02	5.712	6.270	91,10
2	Kuta	6.931	5.661	122,43	3.484	2.755	126,46
3	Kuta Utara	12.105	7.367	164,31	5.174	4.353	118,86
4	Mengwi	11.567	11.210	103,18	6.006	5.908	101,66
5	Abiansemal	8.293	8.713	95,18	3.905	4.767	81,92
6	Petang	2.204	2.816	78,27	1.052	1.390	75,68
	Jumlah	53.875	47.070	114,46	25.333	25.443	99,57

Sumber: RKPD Kabupaten Badung 2023

Berdasarkan data dan informasi di atas, seharusnya Badung memberikan fokus yang lebih untuk mengelola pendidikan masyarakat Petang dan Abiansemal. Selain itu, Badung bisa menggiatkan kejar paket C, B, dan A untuk masyarakat Badung yang tidak tamat SD. Usaha ini akan meningkatkan rata-rata lama sekolah. Badung juga bisa memberikan bantuan pendidikan sarjana untuk penduduk yang kurang mampu, namun berprestasi.

Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Kec Petang	32.371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kec Abiansemal	109.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kec Mengwi	151.132	-	-	-	-	-	-	1	0,01	-	-	1	0,007
4	Kec Kuta Utara	140.113	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01	1	0,01
5	Kec Kuta	114.183	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,04	5	0,044
6	Kec Kuta Selatan	163.625	1	0,006	-	-	-	-	-	-	2	0,01	3	0,018
	Jumlah	711.300	1	0,001	-	-	-	-	1	0,001	8	0,011	10	0,014

Sumber: RKPD Kabupaten Badung 2023

Berdasarkan data dan informasi di atas terlihat bahwa terdapat dua kecamatan yang tidak memiliki rumah sakit yaitu Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal. Rasio dokter terhadap penduduk pada kedua kecamatan ini juga kurang dari 1. Selengkapnya pada tabel berikut:

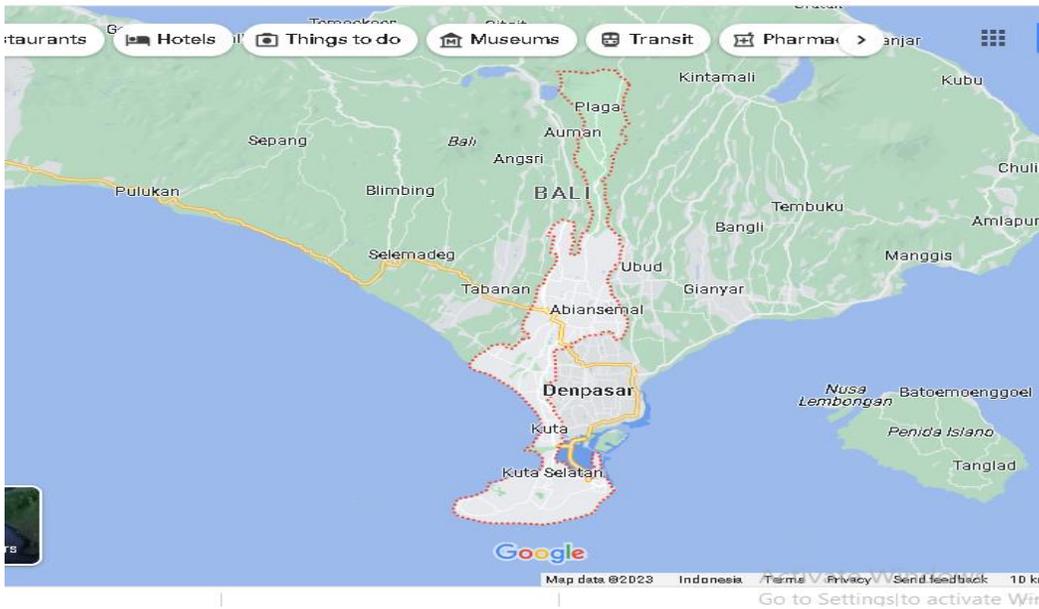
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=(4/3)*1000)
1	Kec Petang	32.371	25	0,772
2	Kec Abiansemal	109.876	45	0,410
3	Kec Mengwi	151.132	149	0,986
4	Kec Kuta Utara	140.113	67	0,478
5	Kec Kuta	114.183	352	3,083
6	Kec Kuta Selatan	163.625	192	1,173
	Jumlah	711.300	830	1,167

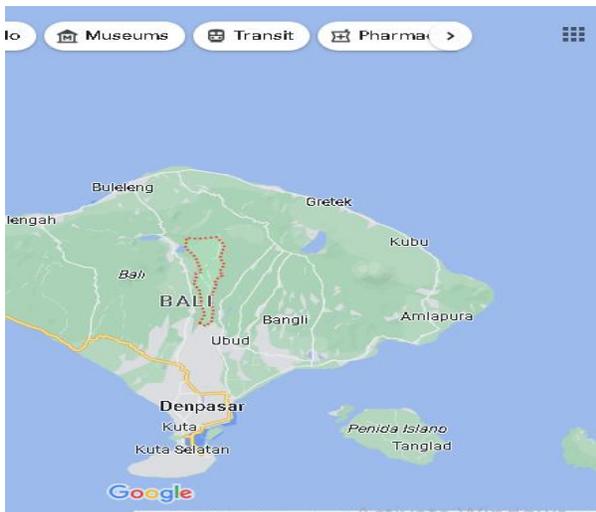
Sumber: RKPD Kabupaten Badung 2023

Berdasarkan data dan informasi dari kedua tabel di atas, jumlah rumah sakit dan rasio dokter terhadap penduduk lebih tinggi pada Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Mengwi. Ketiga kecamatan ini merupakan pusat pariwisata dan ibukota kabupaten. Sudah seharusnya Badung memberikan perhatian lebih kepada Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Petang, dan Kecamatan Abiansemal. Hal ini dilakukan agar terjadi pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Kabupaten Badung.

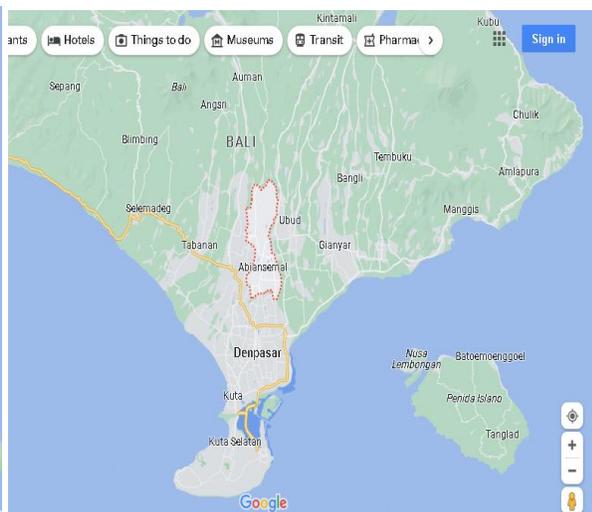
Pada sektor ekonomi, Kabupaten Badung mendapatkan pukulan telak dari pandemi covid-19. Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian menjadi lumpuh. Pada tahun 2021, lapangan usaha yang berkontribusi besar bagi perekonomian Badung adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 23,25%; transportasi dan pergudangan sebesar 12,75%; konstruksi sebesar 11,66%; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 8,50%.



Peta Kabupaten Badung



Peta Kecamatan Petang



Peta Kecamatan Abiansemal

Sebagaimana dalam peta di atas, Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal berada di Kabupaten Badung bagian utara. Badung bagian tengah merupakan kawasan perkotaan ibukota kabupaten. Pusat pariwisata Kabupaten Badung berada di Badung bagian selatan yang meliputi Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Utara. Karena pariwisata merupakan tulang punggung perekonomian Badung, maka Badung Selatan menjadi pusat perekonomian Kabupaten Badung.

Menilik Kecamatan Petang dalam Angka 2022, jumlah penginapan (Inn) di Kecamatan Petang hanya 5 (lima) buah. Dalam buku Kecamatan Abiansemal dalam Angka 2022, jumlah penginapan (inn) hanya 7 (tujuh) buah. Sektor pertanian memang menjadi andalan dan masih dominan pada kedua kecamatan. Kecamatan Petang merupakan penghasil pisang dengan produksi 166.156 kuintal. Sedangkan Kecamatan Abiansemal memproduksi durian sebanyak 12.983 kuintal.

Hasil penelitian Wiradnyanda & Bendesa (2021) menyebutkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara pariwisata dengan kemiskinan di Kabupaten Badung. Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan sektor pariwisata secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Badung. Namun secara parsial hanya sector pariwisata yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Badung.

Sebagaimana sektor pendidikan serta kesehatan, hendaknya pemerintah Kabupaten memberikan perhatian yang lebih terhadap pemerataan pariwisata untuk Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal. Karena pertanian merupakan sector andalan, Petang dan Abiansemal bisa mulai mengembangkan agrowisata dan ekowisata.

Agar perekonomian meningkat, Badung juga bisa mengadopsi indikator-indikator *Ease of Doing Business Index*. EODB adalah sebuah indeks buatan Bank Dunia untuk menentukan mudah tidaknya berbisnis di sebuah Negara. EODB bertujuan untuk mengagihkan dasar yang objektif kepada investor tentang kemudahan berusaha di suatu Negara. Indikator penilaian pada EODB:

1. Perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.
2. Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.
3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.
4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.
6. Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.
7. Prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.
8. Tingkat kemudahan untuk mengekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komperatif dan impor suku cadang.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. IKM yang tinggi akan meningkatkan daya saing daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian. Tingginya nilai IKM juga menandakan tingkat profesionalitas pemberi layanan. Berdasarkan tabel IKM sebelumnya, Badung harus meningkatkan pelayanan publik terutama pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BDK Diklat/BKPSDM, Dinas Kebudayaan, Disdikpora, Dinas Kesehatan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Kecamatan Kuta.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian makalah, kesimpulan yang dapat diambil:

1. IPM Kabupaten Badung dalam sepuluh tahun terakhir 2013-2022 cenderung meningkat dan pada tahun 2022 mencapai 82,13.
2. Prosentase belanja APBD Kabupaten Badung sebesar 51,43% sangat mendukung peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan.
3. Kemandirian keuangan APBD Kabupaten Badung tahun 2023 sebesar 0,86 atau sangat tinggi.
4. Solvalibilitas anggaran APBD Kabupaten Badung tahun 2023 sebesar 3,11 atau sangat sehat.
5. Fleksibilitas keuangan APBD Kabupaten Badung tahun 2023 sangat tinggi.

Berdasarkan uraian makalah, saran yang dapat diberikan:

1. Keberpihakan, kemandirian, dan kesehatan APBD Kabupaten Badung Tahun 2023 terhadap peningkatan IPM harus dibarengi dengan ketepatan sasaran kegiatan.
2. Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal agar mendapatkan perhatian lebih untuk sektor pendidikan.
3. Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, dan Kecamatan Kuta agar mendapatkan perhatian lebih untuk sektor kesehatan.
4. Kecamatan Petang dan Kecamatan Kuta agar mendapatkan pemerataan pariwisata dengan mengembangkan agrowisata dan ekowisata untuk mengurangi kemiskinan.
5. Pelayanan publik terutama pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BDK Diklat/BKPSDM, Dinas Kebudayaan, Disdikpora, Dinas Kesehatan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Kecamatan Kuta harus ditingkatkan.

Daftar Pustaka

Nurcholis, Hanif & Susi Dwi Harijanti. 2021. Negara Bagian dan Pemerintahan Lokal. Tangerang. Universitas Terbuka. Edisi Kesatu. Cetakan Kedua.

Chalid, Peni. 2019. Teori dan Isu Pembangunan. Tangerang. Universitas Terbuka. Edisi Kedua. Cetakan Keempat.

- Nugroho, Adi & Dina Nur Rahmawati. 2018. Indeks Pembangunan Manusia 2018. Badan Pusat Statistik.
- Pratiwi, Ayu Manik & Desak Gede Prita Widia Wirianti, 2022. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Badung Menurut Lapangan Usaha 2017-2021. Badan Pusat Statistik.
- Wiriyanti, Dsk Gd Prita Widia, Jimmy Nickelson, Putu Sukartana. 2023. Kecamatan Petang Dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung.
- Wiriyanti, Dsk Gd Prita Widia, Jimmy Nickelson, Putu Sukartana. 2023. Kecamatan Abiansemal Dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung.
- Ardi, Riza Dewi Ai. 2011. Analisis Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember). Skripsi. Universitas Jember. Fakultas Ekonomi.
- Winanri, Etik, Rahmi Handayani & Ahmad Soleh. 2022. Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Manajemen dan Sains. Volume 7. Nomor 1.
- Wiradnyana, I Komang & I.K.G. Bendesa. 2021. Analisis Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Pariwisata, Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Kabupaten Badung. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Volume 10. Nomor 7.
- Istianto, Taufiq, Anderson G Kumenaung & Agnes L. CH. P. Lopian, 2021. Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Bolaang Mongondow Raya. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Volume 22. Nomor 3.
- Sidabutar, Sanniana, elidawaty Purba & Pauer Darasa Panjaitan. 2020. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. Jurnal ekonomi Pembangunan. Volume 2. Nomor 2.
- Paramita, Ahsani. 2020. Analisis Dampak Realisasi APBD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar. Bata Ilyas Journal of Accounting. Volume 1. Nomor 1.
- Palayukan, Marselus. 2019. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal BPPK. Volume 12. Nomor 2.

Sari, Ida Ayu Candra Yunita & Ni Luh Supadmi, 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 15. Nomor 3.

Setiawan, Mohammad Bhakti & Abdul Hakim. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publikations/19711-ID-indeks-pembangunan-manusia-indonesia.pdf>

Ritonga, Irwan Taufiq. Analisis Laporan Keuangan Pemda (Slide Materi). Universitas Gadjah Mada. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Magister Akuntansi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Kabupaten BAdung Tahun 2021-2026.

<https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-lebih-dekat-bagian-1>

<https://badungkab.bps.go.id/indikator/26/84/1/ipm-kabupaten-badung.html>

<http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2010/03/Pertemuan-4.pdf>

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/15/1931/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2022-mencapai-72-91--meningkat-0-62-poin--0-86-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--72-29-.html>

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/40033/tujuh-arah-kebijakan-prioritas-rencana-kerja-pemerintah-tahun-2023/0/berita>

<https://nenytriana.wordpress.com/2022/12/15/multistakeholders-collaboration-dalam-pengelolaan-dana-desa/>

<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/09/Rincian-DAK-Nonfisik-TA-2023.pdf>

<https://djk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/10/Revisi-DAK-Fisik-2023.pdf>